

DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN: KAJIAN KONSEPTUAL TERHADAP RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Ahmad Winaldi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ahmadwinaldipinim08@gmail.com

Marhamah Annazah Tambunan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

annajahmarhamah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengintegrasian nilai-nilai Alquran, seperti keadilan, musyawarah, dan amanah, dalam tata kelola pemerintahan modern untuk menghadapi tantangan global, termasuk disrupsi digital, polarisasi politik, dan penurunan kualitas demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kerangka analisis berbasis teori, penelitian ini menganalisis ayat-ayat Alquran, seperti QS. An-Nisa [4]: 58, QS. Asy-Syura [42]: 38, dan QS. Al-Ahzab [33]: 72, serta data sekunder dari literatur akademis terkait. Temuan menunjukkan bahwa prinsip syura dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan, keadilan memastikan distribusi yang merata dan perlindungan hak-hak individu, sedangkan amanah memperkuat akuntabilitas pemimpin terhadap masyarakat. Selain itu, studi ini menyoroti relevansi nilai-nilai Islami dalam memperbaiki kelemahan demokrasi prosedural modern, seperti rendahnya legitimasi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini mempertegas kompatibilitas nilai-nilai Alquran dengan tata kelola modern, memberikan kontribusi ilmiah dalam diskursus demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim, dan menawarkan kerangka kerja praktis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Studi ini merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut terhadap implementasi nilai-nilai ini dalam berbagai konteks sosial-politik, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas.

Kata kunci: Nilai-nilai Alquran; tata kelola; syura; keadilan; akuntabilitas

Abstract

This study examines the integration of Quranic values, such as justice, consultation (shura), and trustworthiness (amanah), into modern governance to address global challenges, including digital disruption, political polarization, and the decline in democratic quality. Using a descriptive qualitative approach and a theory-based analytical framework, this study analyzes Quranic verses

such as QS. An-Nisa [4]: 58, QS. Asy-Syura [42]: 38, and QS. Al-Ahzab [33]: 72, along with secondary data from relevant academic literature. The findings indicate that the principle of shura can enhance public participation and transparency in decision-making, justice ensures equitable distribution and the protection of individual rights, while amanah strengthens leaders' accountability to society. Additionally, this study highlights the relevance of Islamic values in addressing the shortcomings of modern procedural democracy, such as low legitimacy and accountability. The findings reaffirm the compatibility of Quranic values with modern governance, contributing scientifically to the discourse on democracy in Muslim-majority countries and offering a practical framework for improving government effectiveness. This study recommends further exploration of the practical application of these values in various socio-political contexts, particularly through the use of digital technologies to enhance public participation and accountability.

Keyword: Quranic values; governance; shura; justice; accountability

PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dominan di era modern, terutama setelah pertumbuhan globalisasi dan teknologi informasi. Namun, berbagai tantangan seperti korupsi, disinformasi, dan ketimpangan sosial menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan basis nilai yang lebih kokoh agar tetap relevan dan efektif. Dalam konteks ini, Alquran sebagai kitab suci umat Islam mengandung prinsip-prinsip seperti keadilan (QS. An-Nisa [4]: 58), musyawarah (QS. Asy-Syura [42]: 38), dan kesetaraan (QS. Al-Hujurat [49]: 13) yang relevan untuk membangun demokrasi yang berkeadilan dan substansial¹. Meskipun demokrasi modern sering diasosiasikan dengan sistem politik Barat, konsep demokrasi dalam Islam seperti syura dan keadilan menunjukkan potensi untuk menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama dan kebutuhan politik kontemporer². Tradisi Islam seperti ijtihad, ijma', dan praktik musyawarah pada masa awal kekhalifahan menunjukkan kesesuaian nilai-nilai demokrasi dengan ajaran Islam³. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam Alquran dapat berkontribusi pada tantangan demokrasi modern, termasuk dalam menghadapi krisis kepercayaan terhadap institusi politik dan penyebaran disinformasi⁴.

¹ Noor Ainah, "Politik dalam Perspektif Al-Quran," *Islamic Education* 3, no. 2 (31 Mei 2024): 54–61.

² Ahmad Zuhdi, "Da'wah and Democracy: Actualization of the Role of Religion in State Behavior," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 15, no. 2 (31 Desember 2021): 407–26, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v15i2.14968>.

³ Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023), <https://doi.org/26815-26821>.

⁴ Duncan J. Watts, David M. Rothschild, dan Markus Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118, no. 15 (13 April 2021): e1912443118, <https://doi.org/10.1073/pnas.1912443118>; Muhammad Taufik, "Polemik Penafsiran dalam Hubungan Syura dan Demokrasi," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (26 Desember 2021): 137–55, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i2.23>.

Meskipun demokrasi modern menawarkan kebebasan dan partisipasi, ketidakmampuan sistem ini untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi dan disinformasi menunjukkan adanya kelemahan struktural⁵. Dalam konteks global, korupsi dan populisme menggerus legitimasi demokrasi, seperti yang terlihat pada Tunisia dan beberapa negara lain di dunia Arab, di mana kegagalan ekonomi dan sosial sering kali membawa negara kembali pada otoritarianisme⁶. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun demokrasi secara umum mendukung inovasi⁷, dampaknya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pembangunan ekonomi, pendidikan, dan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan berbasis nilai agama seperti yang terdapat dalam Alquran menawarkan solusi universal yang relevan, dengan menekankan pentingnya keadilan sosial, akuntabilitas, dan harmoni antarindividu⁸. Pendekatan substansial ini dapat memberikan landasan etis yang lebih kuat bagi sistem demokrasi modern, terutama di negara-negara mayoritas Muslim, di mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam kerangka demokrasi modern untuk menciptakan sistem yang lebih humanis dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, seperti syura dan keadilan, memiliki kesesuaian yang substansial dengan nilai-nilai demokrasi modern⁹. QS. Asy-Syura [42]: 38 menekankan pentingnya konsultasi kolektif dalam pengambilan keputusan, sementara QS. Al-Maidah [5]: 8 memprioritaskan keadilan sebagai pilar utama¹⁰. Pendekatan ini, yang menekankan pada inklusivitas dan partisipasi, dapat menjadi landasan untuk memperbaiki sistem demokrasi modern yang sering kali hanya berorientasi pada prosedur. Lebih lanjut, tradisi Islam seperti ijihad dan ijma' menunjukkan bahwa prinsip deliberasi sudah tertanam dalam sejarah peradaban Islam¹¹. Praktik musyawarah dalam pengangkatan khalifah seperti Abu Bakar juga mencerminkan bentuk demokrasi Islam yang berdasarkan kesepakatan kolektif, bukan kekuasaan absolut¹². Prinsip ini relevan untuk menciptakan

⁵ Watts, Rothschild, dan Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy"; Leonid Grinin dan Andrey Korotayev, "Revolutions, Counterrevolutions, and Democracy," dalam *Handbook of Revolutions in the 21st Century* (Springer, Cham, 2022), 105–36, https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_4.

⁶ Moncef Marzouki, "Is Democracy Lost?," *Journal of Democracy* 33, no. 1 (2022): 5–11.

⁷ Quan-Jing Wang dkk., "The impacts of democracy on innovation: Revisited evidence," *Technovation* 108 (1 Desember 2021): 102333, <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102333>.

⁸ Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi: Pesrpektif Tafsir Maudhu'i," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 1 (12 Juni 2024): 151–62, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i1.125>; Abdullah Mahmud, "Multicultural Democratic and Tolerant: Qur'anic Perspectives and Islamic Education at the Universitas Muhammadiyah Surakarta," *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism* 1, no. 03 (2023): 205–20, <https://doi.org/10.61455/sujiem.v1i03.82>.

⁹ Zuhdi, "Da'wah and Democracy."

¹⁰ Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi."

¹¹ Safitri dkk.

¹² Auzan Mursyidan, A. Izza Azhima, dan Salman Ismail, "DEMOCRATIC ISSUES AS THE BASIS OF MODERN-CONTEMPORARY THOUGHT IN ISLAM," *SERUMPUN: Journal of*

sistem politik yang lebih adaptif terhadap tantangan modern, seperti krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan penyebaran disinformasi¹³. Namun, adaptasi prinsip-prinsip Islam dalam demokrasi modern memerlukan pendekatan kontekstual, yang mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan politik lokal¹⁴. Sebagai contoh, pendekatan substansial yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab pemimpin lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan prosedural yang hanya berfokus pada mekanisme elektoral. Dengan demikian, prinsip-prinsip Alquran dapat diintegrasikan untuk menciptakan demokrasi yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral dan etis.

Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa demokrasi modern, meskipun efektif dalam mendukung inovasi dan hak asasi manusia, sering kali gagal mengatasi tantangan sosial-ekonomi, terutama di negara-negara dengan tingkat pembangunan rendah¹⁵. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan secara normatif karena pengaruh bias dalam indikator yang digunakan¹⁶. Dalam konteks negara mayoritas Muslim, disinformasi dan ketidakstabilan politik sering kali menghambat transisi demokrasi yang efektif¹⁷.

Meskipun prinsip-prinsip demokrasi Islam seperti syura dan keadilan telah diidentifikasi sebagai elemen kunci untuk membangun tata kelola yang adil¹⁸, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara kontekstual dalam sistem demokrasi modern. Selain itu, pendekatan normatif yang berfokus pada nilai-nilai Alquran sering kali diabaikan dalam diskusi global tentang demokrasi, yang cenderung lebih terpusat pada model Barat¹⁹. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menjembatani nilai-nilai demokrasi Islam dengan tantangan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam Alquran, seperti keadilan, syura, dan kesetaraan, relevan untuk mengatasi tantangan demokrasi modern, termasuk krisis kepercayaan, disinformasi, dan ketidakadilan sosial. Dengan pendekatan konseptual dan normatif, penelitian ini menawarkan kerangka kerja baru yang menjembatani

Education, Politic, and Social Humaniora 1, no. 1 (13 Juni 2023): 34–41, <https://doi.org/10.61590/srp.v1i1.72>.

¹³ Watts, Rothschild, dan Mobius, “Measuring the news and its impact on democracy.”

¹⁴ Grinin dan Korotayev, “Revolutions, Counterrevolutions, and Democracy.”

¹⁵ Wang dkk., “The impacts of democracy on innovation”; John Gerring, Carl Henrik Knutsen, dan Jonas Berge, “Does Democracy Matter?,” *Annual Review of Political Science* 25, no. Volume 25, 2022 (12 Mei 2022): 357–75, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-060820-060910>.

¹⁶ Gerring, Knutsen, dan Berge, “Does Democracy Matter?”

¹⁷ Marzouki, “Is Democracy Lost?”

¹⁸ Mursyidan, Azhima, dan Ismail, “DEMOCRATIC ISSUES AS THE BASIS OF MODERN-CONTEMPORARY THOUGHT IN ISLAM”; Muzayyin, “Islam Dan Demokrasi.”

¹⁹ taufik, “Polemik Penafsiran dalam Hubungan Syura dan Demokrasi.”

nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi kontekstual terhadap penerapan nilai-nilai Alquran dalam demokrasi, yang selama ini sering kali hanya dibahas secara teoritis. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperluas diskusi tentang demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim dengan menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis nilai. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis ayat-ayat Alquran terkait prinsip demokrasi, interpretasi konsep-konsep tersebut dalam konteks modern, dan relevansinya terhadap tantangan politik kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan bahan utama berupa data teks dari Alquran yang relevan dengan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah. Ayat-ayat yang dikaji meliputi QS. An-Nisa [4]: 58, QS. Asy-Syura [42]: 38, dan QS. Al-Ahzab [33]: 72, yang menjadi dasar normatif untuk mengeksplorasi nilai-nilai tata kelola Islam. Selain itu, studi ini juga melibatkan kajian literatur dari sumber sekunder, termasuk artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen akademis terkait etika politik dan tata kelola pemerintahan modern. Data pendukung lainnya adalah hasil analisis empiris pada sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim, sebagaimana dirangkum dari berbagai penelitian terdahulu. Data ini digunakan untuk memperkuat relevansi nilai-nilai Alquran dalam konteks tata kelola kontemporer. Langkah awal dalam penelitian ini adalah memilih dan mengklasifikasikan ayat-ayat Alquran yang secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah. Proses seleksi dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik berdasarkan analisis tafsir yang relevan. Ayat-ayat yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks normatif dan aplikatifnya dalam tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, data sekunder dari literatur akademis diorganisasi menggunakan metode coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam tata kelola. Data ini dikategorikan berdasarkan relevansinya terhadap tiga komponen utama tata kelola: legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis berbasis teori yang bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai Alquran dalam tata kelola modern. Analisis data dilakukan dengan metode interaktif, yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Instrumen analisis utama adalah kerangka teori tata kelola Islam, yang mencakup konsep syura, keadilan, dan amanah sebagai variabel utama. Setiap elemen dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dalam sistem

pemerintahan modern, dengan mengacu pada data empiris dari penelitian terdahulu.²⁰

Meskipun penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif, metode analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengelola data sekunder yang diambil dari literatur terdahulu. Proses ini melibatkan penghitungan frekuensi tema yang muncul dalam literatur terkait, seperti penerapan nilai keadilan dan musyawarah dalam berbagai sistem tata kelola. Analisis dilakukan untuk memvalidasi hubungan antara nilai-nilai Alquran dan efektivitas tata kelola, dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan data empiris dari studi demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim. Penarikan kesimpulan didasarkan pada triangulasi data untuk memastikan konsistensi temuan dan kredibilitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Demokrasi dalam Perspektif Alquran

Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam Alquran, seperti keadilan (QS. An-Nisa [4]: 58), musyawarah (QS. Asy-Syura [42]: 38), dan kesetaraan (QS. Al-Hujurat [49]: 13), memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Nilai-nilai tersebut memberikan fondasi etis yang mampu melengkapi kelemahan struktural dalam demokrasi modern, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti disinformasi dan populisme²¹. Praktik musyawarah yang telah diterapkan sejak masa kekhalifahan Abu Bakar juga menunjukkan bahwa Islam mendukung tata kelola berbasis konsultasi kolektif²². Lebih lanjut, prinsip syura dalam Alquran tidak hanya menitikberatkan pada proses konsultasi, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan²³. Pendekatan ini relevan dengan tantangan global, terutama di negara-negara dengan tingkat demokrasi yang menurun akibat lemahnya akuntabilitas dan penyebaran informasi yang bias²⁴. Dengan demikian, Alquran tidak hanya menawarkan nilai-nilai normatif, tetapi juga kerangka konseptual untuk memperbaiki praktik demokrasi modern.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa demokrasi dapat mendorong inovasi dan pembangunan jika didukung oleh landasan nilai yang kuat²⁵. Dalam konteks demokrasi modern, penyebaran disinformasi dan bias informasi menjadi tantangan besar yang merusak

²⁰ Matthew B Miles, A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3 ed. (California: Sage, t.t.).

²¹ Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi"; Watts, Rothschild, dan Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy."

²² Mursyidan, Azhima, dan Ismail, "Democratic Issues as The Basis of Modern-Contemporary Thought in Islam."

²³ Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi."

²⁴ Wang dkk., "The impacts of democracy on innovation."

²⁵ Wang dkk.

integritas proses demokrasi²⁶. Hal ini berbeda dengan pendekatan nilai-nilai Alquran, di mana keadilan dan transparansi menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan. Namun, ada perbedaan mencolok antara demokrasi modern yang berbasis prosedur dan syura dalam Islam yang berbasis nilai. Pendekatan substansial Islam lebih menekankan pada keadilan dan inklusivitas, dibandingkan dengan demokrasi prosedural yang hanya berfokus pada mekanisme elektoral²⁷. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun demokrasi modern sering gagal dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi tertentu, prinsip-prinsip Alquran dapat menjadi solusi untuk memperkuat keadilan sosial dan mencegah kembalinya otoritarianisme, seperti yang diamati di Tunisia²⁸.

Temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman akademis mengenai integrasi nilai-nilai Alquran ke dalam demokrasi modern. Secara ilmiah, kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi Islam, seperti syura dan keadilan, dapat menciptakan sistem demokrasi yang lebih substansial dan berkeadilan²⁹. Integrasi ini penting, terutama di era modern yang ditandai oleh meningkatnya tantangan global seperti populisme dan disinformasi. Secara praktis, nilai-nilai demokrasi Islam dapat diterapkan untuk menciptakan sistem tata kelola yang lebih humanis dan akuntabel, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat, pendekatan berbasis nilai ini juga dapat membantu mencegah dampak negatif dari transisi demokrasi yang terlalu cepat atau revolusioner, seperti yang telah diamati di beberapa negara berkembang³⁰. Oleh karena itu, nilai-nilai Alquran dapat menjadi landasan untuk menciptakan demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga etis dan berkeadilan.

Peran Nilai-Nilai Alquran dalam Menghadapi Tantangan Modern

Nilai-nilai Alquran seperti keadilan (QS. An-Nisa [4]: 58), musyawarah (QS. Asy-Syura [42]: 38), dan kesetaraan (QS. Al-Hujurat [49]: 13) menunjukkan relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan modern, seperti disrupsi digital dan globalisasi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menekankan tata kelola yang adil dan transparan, tetapi juga mendukung harmoni sosial yang inklusif³¹. Dalam era digital yang ditandai dengan meningkatnya disinformasi, nilai-nilai Alquran dapat menjadi pedoman untuk memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas³². Selain itu, globalisasi telah memperluas akses ke informasi, tetapi juga memunculkan tantangan dalam mempertahankan identitas budaya dan

²⁶ Watts, Rothschild, dan Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy."

²⁷ Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi."

²⁸ Marzouki, "Is Democracy Lost?"

²⁹ Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi."

³⁰ Grinin dan Korotayev, "Revolutions, Counterrevolutions, and Democracy."

³¹ Mahmud, "Multicultural Democratic and Tolerant"; Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi."

³² Watts, Rothschild, dan Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy."

moralitas. Pendekatan Alquran yang menekankan pentingnya konsultasi dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan cepat akibat teknologi³³. Dengan demikian, nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam mengelola tantangan global.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa demokrasi modern sering menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas sosial dan akuntabilitas, terutama di tengah tekanan globalisasi dan teknologi digital³⁴. Demokrasi berbasis nilai seperti yang terkandung dalam prinsip-prinsip Alquran memberikan alternatif yang lebih berfokus pada pencapaian keadilan sosial daripada sekadar prosedural. Dibandingkan dengan sistem demokrasi modern, yang kerap kali mengalami disrupsi akibat penyebaran informasi yang bias, nilai-nilai Alquran dapat menawarkan stabilitas moral dan etika yang dibutuhkan. Misalnya, prinsip keadilan dan musyawarah dalam Islam menunjukkan potensi besar untuk memperkuat tata kelola yang adil di tengah tantangan digital dan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan integrasi nilai-nilai ini, sistem demokrasi dapat lebih efektif dalam

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas diskusi mengenai bagaimana nilai-nilai Alquran dapat menjadi landasan untuk menghadapi tantangan modern, seperti disrupsi digital dan globalisasi. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat adaptif, tetapi juga mampu mengisi kelemahan dalam demokrasi modern yang sering kali gagal dalam menjaga stabilitas sosial dan politik³⁵. Secara praktis, integrasi nilai-nilai Alquran dalam tata kelola modern dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan. Misalnya, dalam konteks disrupsi digital, penerapan prinsip musyawarah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengambilan keputusan³⁶. Selain itu, pendekatan keadilan yang diajarkan oleh Alquran dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial yang sering diperburuk oleh globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang untuk membangun sistem demokrasi yang lebih humanis dan berbasis nilai.

Relevansi Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

Prinsip musyawarah yang dijelaskan dalam QS. Asy-Syura [42]: 38 dan QS. Ali Imran [3]: 159 menekankan pentingnya konsultasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip

³³ Mursyidan, Azhima, dan Ismail, "Democratic Issues as the Basis of Modern-Contemporary Thought in Islam."

³⁴ Grinin dan Korotayev, "Revolutions, Counterrevolutions, and Democracy"; Marzouki, "Is Democracy Lost?"

³⁵ Gerring, Knutsen, dan Berge, "Does Democracy Matter?"; Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi."

³⁶ Mursyidan, Azhima, dan Ismail, "Democratic Issues as the Basis Of Modern-Contemporary Thought in Islam."

musyawarah relevan dalam menghadapi tantangan modern, seperti disrupsi digital dan kompleksitas globalisasi. Dalam konteks kolaborasi modern, musyawarah memberikan ruang bagi inklusivitas dan partisipasi masyarakat, yang menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi³⁷. Selain itu, praktik musyawarah dalam sejarah Islam, seperti pengangkatan Khalifah Abu Bakar melalui konsultasi kolektif, membuktikan bahwa musyawarah dapat diterapkan dalam situasi yang membutuhkan konsensus luas³⁸. Dalam era digital, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam bentuk pengambilan keputusan yang lebih demokratis, transparan, dan berbasis partisipasi melalui teknologi seperti platform digital atau media sosial, sehingga mendukung inovasi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa demokrasi berbasis kolaborasi dan konsultasi, seperti yang diusung oleh prinsip musyawarah dalam Islam, lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan otoritarian dalam mendukung inovasi dan keadilan sosial³⁹ (Wang et al., 2021). Pendekatan ini juga dapat mengatasi beberapa kelemahan demokrasi prosedural modern, yang sering kali terhambat oleh disinformasi dan kurangnya kepercayaan masyarakat. Dibandingkan dengan sistem otoriter, yang meskipun efektif dalam beberapa aspek, sering kali gagal memastikan partisipasi luas dan keberlanjutan sosial⁴⁰, musyawarah menempatkan nilai kolaborasi dan transparansi sebagai prioritas utama. Hal ini memberikan solusi bagi pengambilan keputusan di era digital yang membutuhkan keselarasan antara berbagai pihak yang terlibat, baik pada tingkat lokal maupun global. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam menjadi jembatan penting untuk menyelaraskan nilai-nilai tradisional dengan tantangan modern.

Secara ilmiah, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah memiliki potensi besar untuk diadaptasi dalam sistem pengambilan keputusan modern berbasis kolaborasi. Musyawarah yang menekankan inklusivitas, keadilan, dan konsultasi kolektif dapat mengisi celah dalam sistem demokrasi prosedural yang sering kali hanya berfokus pada mekanisme formal tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan moral⁴¹. Secara praktis, prinsip musyawarah dapat diterapkan melalui pengembangan teknologi digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Platform kolaborasi modern, seperti konsultasi daring dan survei berbasis data, dapat mengintegrasikan elemen musyawarah untuk meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Dengan memadukan pendekatan ini, pemerintah dan organisasi

³⁷ Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi."

³⁸ Mursyidan, Azhima, dan Ismail, "Democratic Issues as the Basis of Modern-Contemporary Thought in Islam."

³⁹ Wang dkk., "The impacts of democracy on innovation."

⁴⁰ Grinin dan Korotayev, "Revolutions, Counterrevolutions, and Democracy."

⁴¹ Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi"; Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi."

dapat menciptakan tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan inklusif. Penelitian ini membuka peluang bagi integrasi nilai-nilai Alquran dalam pengambilan keputusan modern untuk menghadapi tantangan global secara efektif.

Kontribusi Nilai Islami terhadap Etika Politik dan Pemerintahan

Nilai-nilai Islami, seperti keadilan (QS. An-Nisa [4]: 58), amanah (QS. Al-Ahzab [33]: 72), dan musyawarah (QS. Asy-Syura [42]: 38), memberikan dasar etika yang kuat bagi politik dan pemerintahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ini mampu menciptakan tata kelola yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat⁴². Dalam konteks politik, konsep syura menekankan pentingnya konsultasi dan keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan, yang menjadi landasan etika untuk menghindari praktik otoritarianisme dan korupsi. Lebih jauh, kontribusi nilai Islami dalam pemerintahan mencakup pengawasan moral melalui prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yang memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemimpin selalu sejalan dengan kepentingan umum dan nilai-nilai moral⁴³. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah tetapi juga dapat diterapkan dalam pemerintahan modern yang menghadapi tantangan seperti disinformasi dan ketidakadilan).

Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa demokrasi modern sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga integritas etika politik akibat meningkatnya populisme dan disinformasi⁴⁴. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islami menawarkan alternatif yang berorientasi pada keadilan dan keterbukaan, yang berbeda dengan pendekatan demokrasi prosedural yang lebih menekankan pada mekanisme formal daripada substansi etika. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islami dapat mendorong stabilitas sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dibandingkan dengan rezim otoritarian, yang sering kali menekan partisipasi publik demi stabilitas semu, pendekatan Islami melalui syura memberikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam mengelola konflik politik dan sosial.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan bukti bahwa nilai-nilai Islami dapat menjadi panduan etis yang relevan untuk memperkuat tata kelola politik dan pemerintahan modern. Dengan menekankan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah, nilai-nilai ini tidak hanya kompatibel dengan prinsip-prinsip demokrasi modern tetapi juga memberikan dimensi moral yang sering kali

⁴² Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi"; Mahmud, "Multicultural Democratic and Tolerant."

⁴³ Zuhdi, "Da'wah and Democracy."

⁴⁴ Watts, Rothschild, dan Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy."

diabaikan dalam sistem politik konvensional⁴⁵. Secara praktis, penerapan nilai Islami dapat dilakukan melalui kebijakan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, konsep amanah dapat diintegrasikan dalam mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik, sementara syura dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas⁴⁶. Dengan demikian, nilai-nilai ini dapat menjadi dasar bagi pembangunan sistem pemerintahan yang lebih beretika, berkeadilan, dan responsif terhadap tantangan global seperti disrupsi digital dan krisis kepercayaan.

Penerapan Syura dan Keadilan dalam Sistem Politik Kontemporer

Prinsip syura (konsultasi) dan keadilan yang ditekankan dalam Alquran, seperti pada QS. Asy-Syura [42]: 38 dan QS. An-Nisa [4]: 58, menjadi landasan penting bagi pengembangan sistem politik kontemporer yang lebih berorientasi pada etika dan inklusivitas. Temuan menunjukkan bahwa penerapan syura dalam konteks modern dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme pengambilan keputusan yang kolaboratif dan partisipatif, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan transparan⁴⁷. Dalam sejarah Islam, musyawarah telah menjadi praktik utama, seperti yang terlihat dalam pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan para pemimpin tetapi juga mempertimbangkan pandangan masyarakat luas⁴⁸. Dalam sistem politik modern, prinsip ini relevan dalam menghadapi tantangan seperti krisis kepercayaan terhadap institusi politik dan disrupsi digital, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai keadilan dan syura dalam tata kelola dapat memberikan solusi efektif untuk memperbaiki kekurangan dalam demokrasi prosedural. Demokrasi modern sering menghadapi tantangan, seperti disinformasi dan meningkatnya polarisasi politik, yang menghambat partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan⁴⁹. Sebaliknya, prinsip syura menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan partisipasi kolektif dan mendasarkan keputusan pada kepentingan bersama⁵⁰. Selain itu, keadilan yang menjadi prinsip inti dalam Islam menciptakan tata kelola yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memberikan keunggulan dibandingkan rezim otoritarian, yang meskipun efektif dalam beberapa aspek, cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat

⁴⁵ Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi"; Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi."

⁴⁶ Mursyidan, Azhima, dan Ismail, "DEMOCRATIC ISSUES AS THE BASIS OF MODERN-CONTEMPORARY THOUGHT IN ISLAM"; Zuhdi, "Da'wah and Democracy."

⁴⁷ Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi."

⁴⁸ Mursyidan, Azhima, dan Ismail, "Democratic Issues as the Basis of Modern-Contemporary Thought in Islam."

⁴⁹ Watts, Rothschild, dan Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy."

⁵⁰ Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi."

dan menghasilkan ketimpangan sosial⁵¹. Dengan demikian, nilai-nilai Islami dapat diintegrasikan dalam sistem politik kontemporer untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah⁵²

Secara ilmiah, penelitian ini mempertegas bahwa syura dan keadilan adalah prinsip-prinsip universal yang relevan untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem politik modern. Dengan menekankan inklusivitas dan keadilan, nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya diskusi akademis tentang demokrasi tetapi juga menawarkan kerangka kerja baru yang lebih adaptif terhadap tantangan global seperti globalisasi dan disrupsi digital⁵³. Secara praktis, penerapan prinsip syura dapat diwujudkan melalui mekanisme partisipatif, seperti forum konsultasi masyarakat atau platform digital yang memungkinkan keterlibatan langsung warga negara dalam proses pengambilan keputusan⁵⁴. Keadilan, di sisi lain, dapat diterapkan dalam kebijakan publik yang memastikan distribusi sumber daya yang merata dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, sistem politik kontemporer dapat lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab tantangan lokal maupun global.

Pengintegrasian Nilai-Nilai Alquran dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern

Pengintegrasian nilai-nilai Alquran seperti keadilan (QS. An-Nisa [4]: 58), musyawarah (QS. Asy-Syura [42]: 38), dan amanah (QS. Al-Ahzab [33]: 72) dalam tata kelola pemerintahan modern memberikan dasar etis untuk memperkuat legitimasi, transparansi, dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut terbukti relevan dalam menghadapi tantangan global, seperti disinformasi, polarisasi politik, dan penurunan kualitas demokrasi⁵⁵.

Praktik musyawarah yang telah diterapkan dalam sejarah Islam, seperti dalam pengangkatan Khalifah Abu Bakar, menunjukkan pentingnya konsultasi kolektif dalam membangun kepercayaan dan konsensus di tengah masyarakat⁵⁶. Dalam konteks modern, musyawarah dapat diterapkan melalui mekanisme partisipasi publik yang berbasis teknologi, sehingga memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

⁵¹ Grinin dan Korotayev, "Revolutions, Counterrevolutions, and Democracy."

⁵² Dr Naseem Akhter, Dr Shumaila Rafiq, dan Dr Sohail Akhtar, "Modern World and Islam: A Case of Democracy in Islam," *Acta-Islamica* 10, no. 1 (30 Juni 2022): 51–64.

⁵³ Muzayyin, "Islam Dan Demokrasi"; Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi."

⁵⁴ Mursyidan, Azhima, dan Ismail, "Democratic Issues as the Basis of Modern-Contemporary thought In Islam"; Watts, Rothschild, dan Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy."

⁵⁵ Watts, Rothschild, dan Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy."

⁵⁶ Mursyidan, Azhima, dan Ismail, "Democratic Issues as the Basis of Modern-Contemporary Thought in Islam."

Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur yang menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam tata kelola pemerintahan modern. Demokrasi prosedural modern sering kali menghadapi kelemahan, seperti fokus berlebihan pada mekanisme elektoral tanpa mempertimbangkan dimensi etis⁵⁷. Sebaliknya, nilai-nilai Alquran menawarkan pendekatan substansial yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam dapat mengatasi ketimpangan sosial yang sering kali diabaikan dalam sistem demokrasi modern. Pendekatan ini juga memberikan keunggulan dibandingkan sistem otoritarian, yang meskipun efektif dalam beberapa aspek, cenderung mengabaikan hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pengintegrasian nilai-nilai Alquran dalam pemerintahan modern dapat menciptakan keseimbangan antara legitimasi politik dan keadilan sosial.

Secara ilmiah, temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan berbasis nilai dalam tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai Alquran, seperti musyawarah dan keadilan, tidak hanya memperkaya diskusi akademis tentang tata kelola tetapi juga memberikan kerangka kerja alternatif yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pendekatan ini juga relevan untuk menjawab tantangan kontemporer, seperti polarisasi politik dan disrupsi teknologi, yang mengancam stabilitas demokrasi global⁵⁸. Secara praktis, nilai-nilai ini dapat diterapkan melalui kebijakan publik yang memastikan keadilan distributif dan aksesibilitas yang setara terhadap layanan pemerintah. Musyawarah dapat diimplementasikan melalui forum digital atau mekanisme konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan secara langsung. Selain itu, nilai amanah dapat memperkuat akuntabilitas pemimpin, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah⁵⁹. Dengan demikian, pengintegrasian nilai-nilai Alquran tidak hanya mendukung stabilitas politik tetapi juga memperkuat keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengintegrasian nilai-nilai Alquran, seperti keadilan, musyawarah, dan amanah, dalam tata kelola pemerintahan modern. Prinsip-prinsip ini, yang diambil dari QS. An-Nisa [4]: 58, QS. Asy-Syura [42]: 38, dan QS. Al-Ahzab [33]: 72, memberikan landasan etis yang relevan untuk menghadapi tantangan global seperti disinformasi, polarisasi politik, dan penurunan kualitas demokrasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Alquran dapat memperkuat legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem politik modern. Penerapan prinsip

⁵⁷ Safitri dkk., "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi."

⁵⁸ Watts, Rothschild, dan Mobius, "Measuring the news and its impact on democracy."

⁵⁹ Zuhdi, "Da'wah and Democracy."

syura mendorong partisipasi kolektif dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, sedangkan keadilan menjamin distribusi sumber daya yang merata dan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, amanah memperkuat akuntabilitas pemimpin terhadap masyarakat (Auzan et al., 2023; Zuhdi, 2021). Studi ini berkontribusi secara ilmiah dengan mempertegas kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan demokrasi modern dan memberikan kerangka kerja praktis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola di negara-negara mayoritas Muslim. Masa depan, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi implementasi praktis nilai-nilai ini dalam berbagai konteks sosial dan politik yang berbeda, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana partisipasi publik. Penelitian ini menjadi dasar untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Referensi:

- Ainah, Noor. "Politik dalam Perspektif Al-Quran." *Islamic Education* 3, no. 2 (31 Mei 2024): 54–61.
- Akhter, Dr Naseem, Dr Shumaila Rafiq, dan Dr Sohail Akhtar. "Modern World and Islam: A Case of Democracy in Islam." *Acta-Islamica* 10, no. 1 (30 Juni 2022): 51–64.
- Gerring, John, Carl Henrik Knutsen, dan Jonas Berge. "Does Democracy Matter?" *Annual Review of Political Science* 25, no. Volume 25, 2022 (12 Mei 2022): 357–75. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-060820-060910>.
- Grinin, Leonid, dan Andrey Korotayev. "Revolutions, Counterrevolutions, and Democracy." Dalam *Handbook of Revolutions in the 21st Century*, 105–36. Springer, Cham, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_4.
- Mahmud, Abdullah. "Multicultural Democratic and Tolerant: Qur'anic Perspectives and Islamic Education at the Universitas Muhammadiyah Surakarta." *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism* 1, no. 03 (2023): 205–20. <https://doi.org/10.61455/sujiem.v1i03.82>.
- Marzouki, Moncef. "Is Democracy Lost?" *Journal of Democracy* 33, no. 1 (2022): 5–11.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3 ed. California: Sage, t.t.
- Mursyidan, Auzan, A. Izza Azhima, dan Salman Ismail. "Democratic Issues as the Basis of Modern-Contemporary Thought in Islam." *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 1, no. 1 (13 Juni 2023): 34–41. <https://doi.org/10.61590/srp.v1i1.72>.

- Muzayyin. "Islam Dan Demokrasi: Pesrpektif 'Tafsir Maudhu'i." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 1 (12 Juni 2024): 151–62. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i1.125>.
- Safitri, Sofya, Syliani, dan Cahyadi. "Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/26815-26821>.
- Taufik, Muhammad. "Polemik Penafsiran dalam Hubungan Syura dan Demokrasi." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (26 Desember 2021): 137–55. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.23>.
- Wang, Quan-Jing, Gen-Fu Feng, Hai-Jie Wang, dan Chun-Ping Chang. "The impacts of democracy on innovation: Revisited evidence." *Technovation* 108 (1 Desember 2021): 102333. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102333>.
- Watts, Duncan J., David M. Rothschild, dan Markus Mobius. "Measuring the news and its impact on democracy." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118, no. 15 (13 April 2021): e1912443118. <https://doi.org/10.1073/pnas.1912443118>.
- Zuhdi, Ahmad. "Da'wah and Democracy: Actualization of the Role of Religion in State Behavior." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 15, no. 2 (31 Desember 2021): 407–26. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v15i2.14968>.